

## KEMITRAAN *TRIPLE HELIX* DALAM PROGRAM PEMAGANGAN KE JEPANG DI PROVINSI JAWA TIMUR

Rizal hermansyah  
Sasmita Jati Utama  
M. Husni Tamrin  
Universitas Hang Tuah Surabaya  
[Rizalhermansyah@gmail.com](mailto:Rizalhermansyah@gmail.com)

### ***Abstract***

*The study analyzes Triple Helix Partnership in the Japan Internship Program in East Java Manpower and Transmigration Office. There are three actors in apprenticeship programs to Japan, namely academics, business and government. This study aims to describe and analyze who the actors are and how their respective roles in the Triple Helix partnership. The theory uses Widya Fitriana (2015) which states that each actor has their respective roles such as government actors who have the role as regulators, investors, facilitators and advocacy. Business actors have the creative role of entrepreneurship, technology, products, and the driving force of innovation, driving the development of other industrial sectors, contributing to the development of resources. Academic actors have the role of producing research and scientific research, diffusion technology, participating in participatory planning processes and public decision making, providing expert consultation, creating business incubators. It uses descriptive qualitative method. Data collection techniques are obtained through interview, observation, and documentation. The results indicate that government and academy actors have not performed several roles in the apprenticeship program to Japan.*

**Keywords:** Partnership, *Triple Helix*, Apprenticeship to Japan.

### **I. Pendahuluan**

Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) pada tahun 2015-2019 masalah ketenagakerjaan menjadi salah satu fokus utama dalam perhatian pemerintahan. Salah satu sasaran adalah meningkatkan kualitas dan keterampilan pekerja dengan memperbesar proporsi jumlah tenaga kerja yang kompeten dan diakui secara nasional dan internasional melalui serangkaian proses sertifikasi untuk tenaga berkeahlian tinggi dari 8,4 persen menjadi 14,0 persen dan keahlian menengah dari 30,0 persen menjadi 42 persen. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasal 21 sampai dengan pasal 29 bahwa program pemagangan merupakan upaya pemerintah maupun swasta untuk meningkatkan tenaga kerja yang terampil, kompeten dan produktif. Dengan dibuatnya undang-undang No. 13 Tahun 2003 mengenai ketenagakerjaan dan berdasarkan saling membutuhkan maka terjalinlah kerjasama Indonesia dengan negara-negara di Asia salah satunya dengan Jepang yaitu dalam bidang tenaga kerja asing.

Program pemagangan yang diselenggarakan atas kerjasama antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Jepang (*Government to Government*). Salah satu program kerjasama yang berskala internasional ini adalah dengan *International Manpower Development Organization (IM JAPAN)*. IM JAPAN adalah organisasi yang dibentuk oleh pemerintah Jepang untuk pengembangan sumber daya manusia. Untuk program jenis ini di

selenggarakan oleh Disosnakertrans/Disnakertrans Propinsi di seluruh Indonesia. Seperti yang tercantum dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi mengenai Tata Cara Perizinan Dan Pelaksanaan Pemagangan Di Luar Negeri tahun 2008 pasal 1 yaitu Pelaksanaan pemagangan di luar negeri ialah LPK yang sudah mendapat izin atau institusi, instansi pemerintah, lembaga pendidikan yang sudah tercatat di Direktorat Jenderal yang yanggung jawabnya pada bidang pelatihan kerja di lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk menyelenggarakan pemagangan di luar negeri.

Pada masa sekarang kerja sama tidak hanya melibatkan antara pemerintah dengan pihak swasata, namun harus melibatkan pihak yang lain seperti pihak akademisi. Menurut Etzkowitz&Leydesdorff (1995) *Triple Helix* ialah penggabungan tiga aktor sebagai promotor supaya terus melakukan inovasi. Sebagai rancangan, ide pokok *Triple Helix* ialah sinergitas kemampuan antara akademisi, bisnis, dan pemerintah. *Triple Helix* yang pertama, kaum akademisi yang ada pada lemnbaga pendidikan formal, informal maupun non formal yang memiliki peran sebagai penggerak muculnya ilmu dan gagasan yang menjadi tonggak lahirnya kreativitas insan di Indonesia. Sementara *Triple Helix* yang ke dua yakni Business, pelaku usaha yang bisa mentransformasikan kreativitas menjadi sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis. Terlibat dalam fungsi penyelenggaraan dalam hal norma berbisnis dan coorporate responsibility. Dan *Triple Helix* ketiga yaitu *Government* atau pemerintah sebagai fasilitator dan regulator.

**Tabel 1. Tabel Peserta Program Pemagangan Ke Jepang Provinsi Jawa Timur**

NO	TAHUN	PENDAFTAR	LULUS	PERSENTASE
1	2015	187	52	27.81
2	2016	272	47	17.28
3	2017	945	434	45.93
4	2018	566	296	52.30
5	2019	501	131	26.15
<b>JUMLAH</b>		<b>2.471</b>	<b>960</b>	<b>38.85</b>

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Trasnsmigrasi Jawa Timur, (2019)

Pada tabel diatas dapat dilihat pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 terjadi peningkatan terhadap para pendaftar program pemagangan ke Jepang. Melihat pada tahun 2017 jumlah peserta yang mengikuti program magang ke Jepang mengalami peningkatan sebesar 945 orang, kenaikan jumlah peserta pemagangan Jepang karena terjalinnya kerjasama dengan pondok pesantren dan lembaga pelatihan kerja swasta. Berkaitan dengan hal tersebut terdapat permasalahan yang terjadi pada program pemagangan ke Jepang seperti berita yang dikutip dibawah ini.

“Sayangnya pemerintah hanya hadir sebatas menyiapkan fasilitas semata. Sedangkan urusan keuangan menjadi tanggung jawab *International Manpower Development Organization (IM JAPAN)* dan peserta sendiri” (Sumber: poscore.com, diakses pada 19 November 2018).

Melihat permasalahan diatas masih belum bersinerginya antara beberapa aktor dalam penerapan program *Triple Helix* sehingga terdapat beberapa batasan dalam melakukan tugasnya masing-masing. Dalam mengembangkan program pemagangan ke Jepang dibutuhkan peran aktor lain seperti akademisi untuk meningkatkan program pemagangan ke Jepang. Dari pemaparan diatas betapa perlunya jika *Triple Helix* diterapkan pada program

pemagangan ke Jepang. Dengan diterapkannya *Triple Helix* kita dapat melihat siapa dan apa peran para masing – masing dalam pelaksanaan program pemagangan ke Jepang.

## II. Landasan Teori

### Konsep *Triple Helix*

*Triple Helix* merupakan model yang menjelaskan bagaimana pemerintah, universitas dan dunia usaha (organisasi swasta) harus berhubungan dalam rangka untuk menghasilkan pengetahuan dan teknologi baru yang relevan untuk mendukung dan meningkatkan inovasi Etzkowitz and Leydesdorff, 1998, Terra, dkk,(dalam Subarsono, 2016:227). Model ini mensyaratkan adanya interaksi dan komunikasi yang intensif antar ketiga aktor tersebut Brundin, dkk, (dalam Subarsono, 2016:227). Alasan utama yang mendasari mengapa model ini muncul adalah perkembangan ekonomi yang mengarah pada ekonomi berbasis pengetahuan serta implikasinya yang membuat posisi inovasi menjadi penting. Inovasi tidak lagi ditempatkan sebagai slogan dan pemanis kata namun harus ditempatkan sebagai “a main principle” dalam mengelola organisasi atau negara.

Ranga dan Etzkowitz (2013) menyebut bahwa *Triple Helix* didefinisikan sebagai suatu kumpulan berikut : (1) komponen, yang terdiri atas elemen institusional universitas, industri dan pemerintah, yang masing-masingnya dengan susunan yang luas atas aktor-aktor, di antara perbedaan yang dibuat di antaranya inovator individu dan institusi, inovator *Research and Development* (R&D) dan bukan R&D, dan instansi ‘elemen tunggal’ dan berbagai elemen (hibrida), (2) interaksi elemen terkait (penyaluran teknologi, kerjasama, dan moderasi masalah, manajemen kolaboratif, substitusi, dan berjejaring), dan (3) fungsi yakni persaingan dari elemen sistem yang menetapkan penampilannya. Fungsi pokok sistem *Triple Helix* secara umum meliputi pembangkitan, difusi, dan penggunaan pengetahuan dan terobosan. Dalam pengaktualannya melalui kecakapan tekno-ekonomik yang dideskripsikan pada teori sistem ekonomi, entrepreneurial, kemasyarakatan, kultural, dan kebijakan “ruang *Triple Helix*”: pengetahuan, inovasi, dan ruang konsensus.

Hubungan *Akademia-Industry-Government* tiap-tiap aktor berperan dalam kemampuan dan kompetensi yang akan meningkatkan pembangunan. Mowery dan Sampat (dalam Martin, 2011:16) mengungkapkan yakni “universitas dan perusahaan sebagai partner yang kuat guna memberi pengaruh pemerintah dalam menentukan kebijakan”. Banyak agenda yang bisa dilaksanakan bersama-sama agar tercipta keselarasan pada tiga aktor terkait yakni menempatkan siswa/mahasiswa, menempatkan tenaga pendidik di perusahaan dan pemerintahan, menempatkan pegawai pada industri di universitas dan pemerintahan, bertukar pengalaman, melaksanakan penelitian bersama, peningkatan barang yang ditampung melalui *Research and Development* atau R&D di antara tiga pihak terkait (Etzkowitz dan Loet, 2000:109., Martin, 2011).

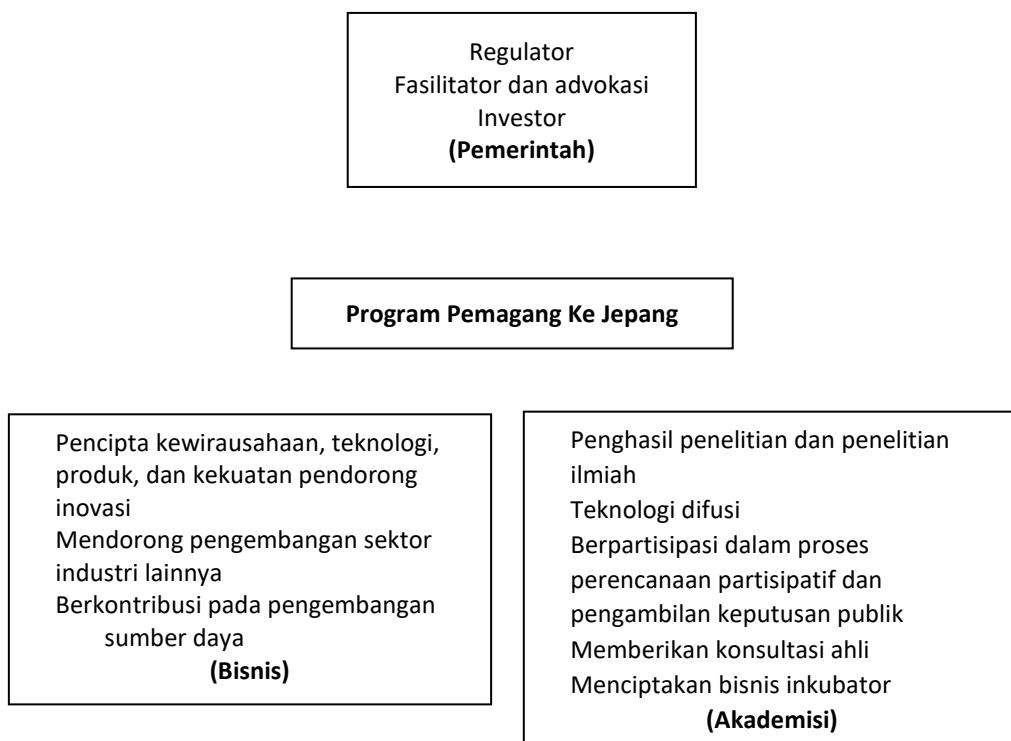
**Tabel 2. Peran Antar Aktor Dalam *Triple Helix***

TRIPLE HELIX	PERAN
PERAN AKADEMISI	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penghasil penelitian dan penelitian ilmiah</li> <li>2. Teknologi difusi</li> <li>3. Berpartisipasi dalam proses perencanaan partisipatif dan pengambilan keputusan publik</li> <li>4. Memberikan konsultasi ahli</li> <li>5. Menciptakan bisnis inkubator</li> </ol>

PERAN BISNIS	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pencipta kewirausahaan, teknologi, produk, dan kekuatan pendorong inovasi</li> <li>2. Mendorong pengembangan sektor industri lainnya</li> <li>3. Berkontribusi pada konservasi sumber daya</li> </ol>
PERAN PEMERINTAH	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Regulator</li> <li>2. Fasilitator dan advokat</li> <li>3. Investor</li> <li>4. Urban planner</li> </ol>

Sumber :Fitriana (2015)

### Kerangka Konseptual



Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengadopsi indikator yang dikemukakan oleh Fitriana yang dimana masing-masing aktor dalam Triple Helix memiliki peran sendiri. Seperti pemerintah memiliki peran regulator, investor, fasilitator dan advokasi. Bisnis memiliki peran Pencipta kewirausahaan, teknologi, produk, dan kekuatan pendorong inovasi, Mendorong pengembangan sektor industri lainnya, Berkontribusi pada pengembangan sumber daya. Sedangkan akademisi memiliki peran penghasil penelitian dan penelitian ilmiah, Teknologi difusi, Berpartisipasi dalam proses perencanaan partisipatif dan pengambilan keputusan publik, Memberikan konsultasi ahli, menciptakan bisnis inkubator.

Pada gambar diatas menunjukkan alur kerangka konseptual dari penelitian ini. Tanda panah pada gambar dibawah menunjukkan bahwa seluruh aspek pada (*Intellectuals, Business, dan Goverment*) Triple Helix saling berkaitan pada program pemagangan ke Jepang. Pihak akademisi (*intellectuals*) di dalam penelitian ini diasumsikan bahwa pihak akademisi memiliki peran melakukan penelitian terkait pemagangan ke Jepang dan Sebagai tempat lahirnya sumber daya manusia atau tenaga ahli. Semakin tingginya tingkat partisipasi akademisi dalam

program pemagangan ke Jepang, semakin tinggi pula tingkat inovasi dan perkembangan program pemagangan ke Jepang. Perguruan tinggi adalah tempat dimana orang-orang berbakat dari semua garis berinteraksi dalam lingkungan yang merangsang pemikiran terbuka, ekspresi diri, gagasan baru, dan eksperimen. Dengan demikian, perguruan tinggi merupakan pusat kreatif yang kuat dalam pembangunan daerah (Florida, Gates, Knudsen, & Stolarick, 2006). Pihak swasta (*Business*) Didalam penelitian ini diasumsikan bahwa para memiliki peran selain sebagai investor dan sebagai distributor, dalam hal ini pihak swasta/bisnis bisa menjadi agen pendorong dalam pengembangan industri. Semakin banyak jumlah perusahaan atau pihak swasta yang bekerja sama, maka semakin banyak pelaku usaha atau investor dari dalam negeri maupun dari negara Jepang yang akan bekerja sama. Pemerintah (*Goverment*) diwakili oleh campur tangan pemerintah dalam kebijakan terkait program pemagangan ke Jepang. Keterlibatan pemerintah dalam program pemagangan ke Jepang sangatlah dibutuhkan. Dalam hal ini peran pemerintah yakni selain pembuat kebijakan juga sebagai penyedia sumber dana dan fasilitator terkait akktifitas di dalam program pemagangan ke Jepang.

### III. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian jenis dekskriptif dan metode penelitian kualitatif. Fokus penelitian adalah mengidentifikasi aktor-aktor dalam *Triple Helix* dalam program pemagangan ke Jepang dan mengidentifikasi peran dari masing-masing aktor *Triple Helix* dalam program pemagangan ke Jepang. Subjek dalam penelitian ini adalah para aktor dalam *Triple Helix (Intellectuals, Business, Goverment)* terkait dengan pemagangan ke Jepang yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, *International Manpower Development Organization (IM JAPAN)*, dan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan diantaranya adalah pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, kesimpulan, penarikan atau verifikasi.

### IV. Hasil Dan Pembahasan

#### Aktor *Triple Helix* Dalam Program Pemagangan Ke Jepang

##### 1. Aktor Pemerintah

Aktor pemerintah dalam model *Triple Helix* adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur dibantu dengan Balai Pelatihan Kerja kota Surabaya hal tersebut sesuai dengan PER.08/MEN/V/2008 pada pasal 1 disebutkan “Penyelenggara pemagangan di luar negeri adalah LPK yang telah mendapatkan izin atau perusahaan atau instansi pemerintah atau lembaga pendidikan yang telah terdaftar pada Direktorat Jenderal yang bertanggung jawab di bidang pelatihan kerja di lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk melaksanakan pemagangan di luar negeri.”

##### 2. Aktor Bisnis

Pelaku swasta atau bisnis dalam model *Triple Helix* di program pemagangan ke Jepang adalah *International Manpower Development Organization (IM Japan)*. Hal tersebut sesuai dengan Nota Kesepakatan Kerjasama antara Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI dengan *The Association International Manpower Development of Medium and Small Enterprises Japan (IM Japan)* Nomor : Kep. 23/MEN/2000 Tanggal 22 Februari 2000 (Thamrin, 2014). Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2018 sudah memberangkatkan kurang lebih 249

peserta. Setelah itu peserta akan diberangkatkan ke perusahaan-perusahaan yang sudah bermitra dengan IM Japan dimana dalam kemitraan tersebut adalah perusahaan skala kecil yang berada di Jepang.

### 3. Aktor Akademisi

Pada aktor akademisi pada program pemagangan ke Jepang selanjutnya adalah Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Berdasarkan MOU nomor Kep.1457/SJ/XI/2016 Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya berkerja sama dengan Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia. Pada kerja sama tersebut pihak Unusa ingin meningkatkan sumberdaya manusia di bidang pendidikan, penelitian dan pengabian masyarakat. Kerjasama tersebut Kementerian Tenaga Kerja melimpahkan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur dan Balai Pelatihan Kerja kota Surabaya dimana pelatihan tersebut dilakukan di Balai Pelatihan Kerja kota Surabaya.

## **Peran Para Aktor *Triple Helix* Pada Program Pemagangan Ke Jepang**

### **Peran Pemerintah Pada Program Pemagangan Ke Jepang**

Pemerintah dalam model *Triple Helix* pada program pemagangan ke Jepang khususnya di Jawa Timur adalah Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi provinsi Jawa Timur. Adapun peran dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi provinsi Jawa Timur untuk pemagangan ke Jepang adalah peran regulasi, peran fasilitator dan advokasi, dan peran investor.

#### 1. Peran regulasi

Dinas Tenaga Kerja Dan Trasmigrasi Provinsi Jawa Timur hanya sebagai pelaksana program saja dari Kementerian Tenaga Kerja melalui Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Dan Produktivitas (ditjen binalattas) bukan pembuat regulator terkait program pemagangan ke Jepang. Dimana dalam melaksanakan program pemagangan ke Jepang dinas tenaga kerja dan transmigrasi provinsi jawa timur menggunakan acuan PER.08 /MEN/V/2008 yang berisi bagaimana tata cara perizinan dan penyelenggaraan pemagangan di luar negeri.

#### 2. Peran fasilitator dan advokasi

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur telah menjalankan perannya sebagai fasilitator dan advokasi dengan mengacu pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 8 tahun 2008 pasal 21 seperti Menyediakan uang saku dan transport sesuai dengan perjanjian antara peserta pemagangan dengan penyelenggara pemagangan, Menyediakan fasilitas pelatihan, Menyediakan instruktur dan tenaga kepelatihan, Menyediakan perlindungan asuransi kecelakaan, kesehatan, kematian yang preminya ditanggung oleh lembaga penyelenggara yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara tempat dilaksanakannya pemagangan, Mengikuti peserta pemagangan dalam uji kompetensi untuk mendapatkan pengakuan kualifikasi kompetensi, Memberikan sertifikat kepada peserta pemagangan yang telah menyelesaikan program pemagangan, Menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh peserta pemagangan selama berada di negara tempat magang, Memulangkan peserta pemagangan baik yang telah selesai mengikuti program magang maupun yang melanggar perjanjian pemagangan.

### 3. Peran investor

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Timur meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui pelatihan-pelatihan pada balai pelatihan kerja sehingga dengan meningkatnya kualitas para peserta magang diharapkan dapat menarik perusahaan-perusahaan di Jepang untuk memanfaatkan para peserta magang yang berkualitas untuk memajukan perusahaan di Jepang.

#### **Peran Bisnis Pada Program Pemagangan Ke Jepang**

Aktor bisnis pada model *Triple Helix* pada program pemagangan ke Jepang khususnya di Jawa Timur adalah *International Manpower Development Organization (IM Japan)*. peran *IM Japan* Pencipta kewirausahaan, teknologi, produk, dan kekuatan pendorong inovasi, Mendorong pengembangan sektor industri lainnya, dan Berkontribusi pada pengembangan sumber daya.

1. Ex peserta pemagangan tidak sedikit yang mendirikan usaha dengan bermodalkan ilmu yang diperoleh ketika para peserta masih magangan di Jepang. Dengan adanya usaha bisnis baru yang sudah didirikan diharapkan bisa menyerap tenaga kerja dan mrngurangi tingkat pengangguran.
2. Dalam peran Mendorong pengembangan sektor industri lainnya disini pihak *IM Japan* dibantu dengan pemerintah Indonesia menciptakan peserta yang berkualitas melalui program pemagangan ke Jepang dimana para peserta melalui pelatihan dan seleksi yang ketat. Para peserta yang telah memalui program pemagangan dapat dimanfaat dengan baik oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia maupun perusahaan dari Jepang.
3. Pengembangan sumber daya manusia yang dilakukan oleh *IM Japan* dengan memberi pelatihan kepada para peserta program pemagangan ke Jepang mulai dari awal pelatihan di indonesia sampai para calon peserta sudah berada di Jepang.

#### **Peran Akademisi Pada Program Pemagangan Ke Jepang**

Aktor akademisi pada model *Triple Helix* pada program pemagangan ke Jepang khususnya di Jawa Timur adalah Universitas Nahdhatul Ulama Surabaya dimana UNUSA sudah berkerja sama dengan Kementrian Tenaga Kerja Republik Indonesia terkait pengembangan sumber daya manusia pada Universitas Nahdhatul Ulama Surabaya. Adapaun peran Universitas Nahdhatul Ulama Surabaya adalah Penghasil penelitian dan penelitian ilmiah, Teknologi difusi, Berpartisipasi dalam proses perencanaan partisipatif dan pengambilan keputusan publik, Memberikan konsultasi ahli, Menciptakan bisnis inkubator.

1. Penghasil penelitian dan penelitian ilmiah. Peran universitas nahdlatul ulama surabaya dalam penghasil penelitian sudah berjalan dengan baik, namun untuk mengenai program pemagangan ke jepang masih belum ada.
2. Teknologi difusi. Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya masih belum melakukan teknologi difusi atau penyebaran teknologi terutama pada program pemagangan ke Jepang dikarenakan belum adanya minat dari mahasiswa dan dosen Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya.

3. Berpartisipasi dalam proses perencanaan partisipatif dan pengambilan keputusan publik. Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya berpartisipasi dalam perencanaan partisipatif dalam hal ini meningkatkan kualitas para mahasiswanya yang berkerjasama dengan Kementerian Tenaga Kerja dalam hal mengikuti program yang sudah dibuat oleh pemerintah yaitu pemagangan ke Jepang melalui jalur *caregiver* atau perawat lansia.
4. Memberikan konsultasi ahli. Pihak UNUSA melalui *UNUSA career center* memberikan konsultasi terkait pemagangan ke Jepang melalui bidang caregiver atau perawat lansia. Pemberian konsultasi tersebut berupa informasi-informasi terkait pemagangan ke Jepang, apa yang perlu dipersiapkan, dan bagaimana cara mendaftar dan hal tersebut sangatlah dibutuhkan oleh mahasiswa yang ingin mengikuti pemagangan ke Jepang untuk mempersiapkan diri mereka.
5. Menciptakan bisnis incubator. Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya sudah membuat sebuah inkubator bisnis yaitu Entrepreneur Plus (EnPlus) namun hanya sebatas untuk kalangan mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya saja karena bisnis inkubator yang dibuat oleh UNUSA masih baru yaitu pada tahun 2018 sehingga cakupan masih belum luas untuk keranah pemagangan ke Jepang.

Berdasarkan penjelasan peran aktor *Triple Helix* diatas dapat disimpulkan bahwa tidak semua aktor *Triple Helix* pada program pemagangan ke Jepang tidak melakukan perannya sesuai teori yang sudah dijelaskan sebelumnya. Pada aktor pemerintah yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur dalam hal program pemagangan ke Jepang Disnakertrans Provinsi Jawa Timur tidak menjalankan perannya sebagai regulator dikarenakan Disnakertrans Provinsi Jawa Timur dalam Program Pemagangan ke Jepang adalah sebagai pelaksana program yang telah dibuat oleh Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia melalui Dirjen Binalattas. Pada aktor bisnis yaitu *IM Japan* dalam program pemagangan ke Jepang sudah melakukan semua peran pada *Triple Helix* dengan baik hal ini dapat dilihat pada tabel diatas mulai dari pencipta kewirausahaan, teknologi, produk, dan kekuatan pendorong inovasi, mendorong pengembangan sektor industri lainnya, dan berkontribusi pada pengembangan sumber daya. Disisi lain pada aktor akademisi yaitu Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya hanya melakukan peran berpartisipasi dalam proses perencanaan partisipatif dan pengambilan keputusan publik dan memberikan konsultasi ahli. Sedangkan peran lain seperti pengasil penelitian dan penelitian ilmiah, teknologi difusi, dan menciptakan bisnis inkubator belum terlaksana dikarenakan beberapa hal seperti kurangnya minat dan informasi terkait pemagangan ke Jepang.

## V. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan yang sesuai dengan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Aktor pemerintah yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur dan memiliki peran regulator, fasilitator dan advokasi, dan investor. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur tidak melakukan perannya sebagai regulator dikarenakan Disnakertrans Provinsi Jawa Timur dalam program pemagangan ke Jepang hanya sebagai pelaksana program dari Kementerian Tenaga Kerja melalui Direktur Jendral Bina Pelatihan dan Produktivitas dan bukan sebagai regulator.

2. Aktor bisnis yaitu *International Manpower Development Organization* (IM Japan) yang memiliki peran pencipta kewirausahaan, teknologi, produk dan kekuatan pendorong inovasi, mendorong pengembangan industri lainnya, dan berkontribusi pada pengembangan sumber daya. Aktor bisnis yaitu IM JAPAN sudah melakukan semua perannya dalam program pemagangan ke Jepang.
3. Aktor akademisi yaitu Universitas Nahdlatul Ulama yang memiliki peran penghasil penelitian dan penelitian ilmiah, teknologi difusi, berpartisipasi dalam proses perencanaan partisipatif dan pengambilan keputusan, memberikan konsultasi ahli, dan inkubator bisnis. Melihat dari peran Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya belum terlaksanyanya peran penghasil penelitian dan penelitian ilmiah, Teknologi difusi dikarenakan belum adanya minat dan informasi terkait program pemagangan ke Jepang dari mahasiswa maupun dosen sedangkan pada peran menciptakan bisnis inkubator sudah berjalan namun masih tergolong baru sehingga butuh pengembangan lebih lanjut untuk memperluas sasarannya yang sekarang masih dikalangan kampus UNUSA saja.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya beberapa aktor belum melakukan peran dalam program pemagangan ke Jepang. Agar program pemagangan ke Jepang berjalan seperti aktor dari pemerintah dan akademisi yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur dan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya harus melakukan peran dengan maksimal. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, berikut saran-saran yang dapat diberikan oleh penulis, antara lain:

1. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur harus lebih memaksimalkan sosialisasinya terkait program pemagangan ke Jepang ke universitas lainnya sehingga tidak hanya Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya saja namun memberi peluang universitas lain untuk bergabung dengan program pemagangan ke Jepang.
2. Pihak Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya harus lebih meningkatkan sosialisasinya mengenai program pemagangan ke Jepang dengan bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur melalui cara mengadakan workshop atau seminar mengenai program pemagangan ke Jepang. Hal tersebut bisa meningkatkan minat dan informasi mahasiswa maupun dosen mengenai program pemagangan ke Jepang sehingga kedepannya akan ada penelitian maupun inovasi yang bisa diterapkan di program pemagangan ke Jepang.
3. Perlu adanya pengembangan lebih lanjut terkait bisnis inkubator yang sudah dijalankan oleh Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Dalam pengembangan tersebut diharapkan dapat meningkatkan sasarannya tidak hanya dikalangan UNUSA saja namun bisa bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur untuk memperluas sasaran dari bisnis inkubator UNUSA yang dapat membantu para peserta program pemagangan ke Jepang untuk menentukan bisnis yang akan didirikan.
4. Untuk penelitian selanjutnya, peneliti berharap akan ada penelitian mengenai aktor-aktor lain terkait program pemagangan ke Jepang di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur .

## Daftar Pustaka

- Etzkowitz, H dan L, Leydesdorff . 1995. The *Triple Helix: University-Industry-Government Relations: A Laboratory for Knowledge Based Economic Development.* EASST Review, Vol. 14, No. 1, pp. 14-19.,
- Florida, Richard., Gates, Gary., Knudsen, Brian., and Stolarick, Kevin. 2006. *The University and the Creative Economy.*
- Martin, M. 2011. N Search Of The *Triple Helix: Academia-Industri-Goverment Interaction In China, Poland, And The Republic Of Korea,* United Nation Educational, Scientific Adn Cultural Organization (Unesco), International Intitute For Educational Planning .
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi tahun 2008 Tentang Tata Cara Perizinan Dan Penyelenggaraan Pemagangan Di Luar Negeri.
- Ranga dan H. Etzkowitz.2013.*Triple Helix System : An Analytical Framework for Innovation Policy and Practice in the Knowledge Society, Industry and Higher Education* 27 (4): 237-262.
- Subarsono, A. 2016.Kebijakan Publik Dan Pemerintahan Kolaboratif Isu-Isu Kontemporer.Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) tahun 2015-2019.
- Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.